



PENETAPAN

Nomor 578/Pdt.P/2023/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 21 November 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor : 578/Pdt.P/2023/PA.Bdw tanggal 21 November 2023, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 12 Februari 2019 di KABUPATEN BONDOWOSO, dengan;
2. wali nikah bernama ARI. yang menikahkan adalah Kyai Narawi;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 578/Pdt.P/2023/PA.Bdw



3. serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
4. namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Pakem Kabupaten Bondowoso;
5. Bahwa pernikahan para Pemohon setelah pasrah wali dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu ;
6. Sawan, Bondowoso 03 Juni 1971, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Andungsari Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso;
7. Hosen, Bondowoso, 02 Oktober 1994, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Andungsari Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso;
8. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus perawan dalam usia 15 tahun dan pemohon II berstatus jejaka dalam usia 21 tahun;
9. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Vanesa Muslimah, Bondowoso, 14 November 2022;
10. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II hasil perkawinan dan hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II, serta anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, didik dan rawan dengan baik;
11. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut, sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
12. Bahwa Meskipun dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Vanesa Muslimah, Bondowoso, 14 November 2022, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah;
13. Bahwa kemudian pemohon I dan pemohon II menikah ulang pada tanggal dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 21 Agustus 2023 nomor : 3511171082023005;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 578/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa karena anak Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum keluarnya Akta Nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

15. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Bondowoso, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

16. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER;;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, anak yang bernama: Vanesa Muslimah, Bondowoso, 14 November 2022, adalah anak sah dari perkawinan pemohon I (PEMOHON 1) dengan pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER;;

Atau memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK : 3511171011980001 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 578/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3511176005040003 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem Nomor :3511171082023005 tanggal 21 Agustus 2023, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
5. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Saudara Arifin dan Maida Nomor B/136330/XI/2021/Perinatologi yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah sakit Bhayangkaran Kabupaten Bondowoso, tanggal 13 November 2023, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nama : SAKSI 1, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai saudara sepupu para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 21 Agustus 2023;
- Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem, Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya telah menikah diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Kecamatan Pakem dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Ari, maskawin berupa uang sebesar

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 578/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000 dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama Swan dan Hosen;

- Bahwa pada saat menikah tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Jejak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Vanesa Muslimah;
- Bahwa Para Pemohon mengalami kesulitan dalam pembuatan akte kelahiran anaknya tersebut;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahaanya;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

2. Nama SAKSI 2, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai saudara para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 21 Agustus 2023;
- Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem, Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya telah menikah diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Kecamatan Pakem dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Ari, maskawin berupa uang sebesar

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 578/Pdt.P/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000 dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama Swan dan Hosen;

- Bahwa pada saat menikah tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Jejak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Vanesa Muslimah;
- Bahwa Para Pemohon mengalami kesulitan dalam pembuatan akte kelahiran anaknya tersebut;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahaanya;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama menetapkan anak yang bernama Vanesa Muslimah, laki laki, umur ... tahun (Lahir di Bondowoso Bondowoso, tanggal....) adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, sebagai dasar hukum untuk mengurus Administrasi Dinas Kependudukan dan catatan sipil lainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan diantara orang-orang yang beragama Islam. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 578/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang No. 50 tahun 2009 yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda dengan P.1 sampai dengan P.5. surat-surat tersebut merupakan akta otentik dan telah dicocokkan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup, dan ada relevansinya dengan perkara ini, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II), dapat diketahui bahwa para Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam, dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bondowoso ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; ,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Surat kelahiran atas nama Vanesa Muslimah, dapat diketahui bahwa anak tersebut adalah hasil hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai nilai yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti P1 s/d P5 serta keterangan para saksi dapat diperoleh fakta pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pakem pada tanggal 21 Agustus 2023;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 578/Pdt.P/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pakem, Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu telah menikah secara agama Islam pada tanggal di rumah orang tua Pemohon 2 di KABUPATEN BONDOWOSO;

- Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berumah tangga dalam satu keluarga dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Vanesa Muslimah umur ..., tahun (Lahir di Bondowoso, tanggal ...);
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan asal usul anak ini sebagai dasar untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasa 42, jo. Pasal 95 KHI Bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari adanya perkawinan yang sah. Sedang menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang beragama Islam dan telah melakukan perkawinan menurut hukum agama Islam, dan akibat adanya perkawinan tersebut telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Vanesa Muslimah umur ... tahun (Lahir di Bondowoso tanggal), oleh karena itu anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'I dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 :

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Dan tidaklah tetap sahnya nasab (keturunan), kecuali dengan bukti yang sempurna, yaitu 2 orang saksi laki-laki;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan ini dengan alasan sebagai dasar hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan catatan sipil lainnya;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 578/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. (3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon ternyata sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 jo pasal 49 huruf (a) angka nomor 20 dalam penjelasan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 578/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, anak yang bernama: Vanesa Muslimah, Bondowoso, 14 November 2022, adalah anak sah dari perkawinan pemohon I (PEMOHON 1) dengan pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 578/Pdt.P/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. **Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.**
Panitera Pengganti,

Tri Anita Budi Utama, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	320.000,00,-
Biaya PNB	: Rp	20.000,00,-
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	590.000,00,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 578/Pdt.P/2023/PA.Bdw